

Implementasi Sistem Perlindungan Anak dalam Kasus Kenakalan Seksual Anak di Jatinegara, Jakarta Timur

Emmy Lucy Smith dan Vinita Susanti

Universitas Indonesia
elsmith67@yahoo.com

Abstract

This research discusses the implementation of a child protection system in cases of child sexual delinquency in Jatinegara, East Jakarta. This research uses a qualitative method of cases of sexual delinquency 7 children, 6 of whom were under 12 years old. The main theory used in this study is the Child Development Ecology Theory from Uri Bronfenbrenner. This study analyzes how the implementation of the child protection system, that is the influence of the environment of child microsystems, mesosystems and macrosystems in preventing and handling cases of child sexual delinquency in Jatinegara, East Jakarta. This research found that the child protection system, both at the level of microsystems, mesosystems and macrosystems, had not been properly implemented. This research was conducted using a criminology approach to social welfare. In this approach analyzing the child protection system to be able to see the problems experienced by children who commit sexual mischief from the point of view of the responsibilities of parents and the community and the state's obligation to fulfill children's rights. Primary data collection in this study was conducted by observation, in-depth interviews, study of documents and secondary data obtained through the literature review process.

Keywords: *Child Sexual Delinquency, Child Protection System, Child Development Ecology Theory, Criminology Social Welfare.*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan, kita sering dikejutkan adanya tindak kriminalitas yang dilakukan anak. Pada awalnya hanya kenakalan anak yang biasa saja. Namun nampaknya kenakalan anak ini sudah menjurus pada tindak kriminalitas, seperti mencuri, tawuran, mem-begal, memperkosa bahkan sampai mem-bunuh.

Data KPAI tahun 2011-2014 menunjukkan kasus kenakalan anak meningkat, yaitu 695 (2011), 1.413 (2012), 1.428 (2013) dan 2.208 (2014). KPAI juga menemukan fakta bahwa anak yang menjadi pelaku kekerasan mengalami kenaikan. Tahun 2014, tercatat

67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sementara pada 2015, menjadi 79 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada 2015.

Dari kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, untuk kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak proporsinya cukup tinggi, yaitu 17%-25% dibanding kejahatan lain, seperti pembunuhan, pencurian, penculikan. KPAI menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2011 - 2016 mencapai 1.965 atau sekitar 30% dari total keseluruhan kasus. Sementara itu, hasil

Susenas BPS mengungkapkan, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi, namun studi yang menemukan argumentasi mengapa anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sangat minim. Dari 6 kasus kenakalan seksual anak berusia di bawah 12 tahun yang terjadi tahun 2016-2018 di berbagai kota terlihat bahwa kenakalan seksual dilakukan oleh anak laki-laki terhadap anak laki-laki dan perempuan. Usia anak yang melakukan kenakalan seksual dan korbannya semua di bawah usia 12 tahun. Baik anak yang melakukan kenakalan seksual maupun korbannya sudah sekolah, baik PAUD maupun SD.

Di Jakarta, dugaan kasus pemerkosaan anak berusia 5 tahun di Jakarta Timur oleh tujuh anak laki-laki yang masih belia, SF (12), FR (7), EG (5), BK (5), IK (6), RD (7), HR (10), muncul di berbagai media massa awal Oktober 2016. Ke tujuh anak ini tinggal di sekitar rumah korban. Diduga, otak dari pemerkosaan ini adalah SF (12). Selain itu ada satu anak lagi yang terlibat dalam aksi ini, yaitu DF (8) yang bertugas menjaga pintu dan memberitahu temannya jika ada yang datang. Tempat terjadinya pemerkosaan ini adalah rumah kosong sekitar rumah korban. Kejadian ini bukan merupakan kejadian pertama kali dialami GS. Sebelumnya, GS diperkosa oleh SF (12) dengan membujuk GS agar bermain di rumah kosong yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Rumah kosong itu letaknya 20 meter dari tempat tinggal korban. Seminggu kemudian, tersangka SF kembali memerkosa korban GS dan mengajak keenam rekannya. Bocah lainnya berada di dalam rumah tersebut untuk secara bergantian memerkosa GS. GS akhirnya

mengeluh kepada orangtuanya bahwa organ vitalnya sakit, terlebih saat buang air kecil. Disitulah orangtua mengetahui bahwa putrinya telah diperkosa.

Orangtua korban akhirnya melaporkan ke RT dan RW setempat untuk mediasi atau jalur damai. Namun, tidak ditemukan mufakat antara orangtua korban dan anak-anak nakal tersebut. Orangtua GS seorang petugas kebersihan di daerah Jakarta Selatan yang tidak mengerti hukum dan kasus ini mereka laporkan ke tetangganya, Adam (31) yang langsung mengantarkan mereka ke Polsek Jatinegara. Pada tanggal 20 Oktober 2016, orangtua GS datang ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Timur melaporkan kasus pemerkosaan putrinya. Saat ini korban sedang divisum dan menunggu hasil visum resmi. Jika terbukti bahwa pelaku kekerasan seksual adalah ketujuh tersangka tersebut, mereka harus didampingi Bapas selama menjalani pemeriksaan. Mereka juga akan menjalani konseling yang akan ditangani Kementerian Sosial.

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan beberapa definisi konseptual dan teori. Beberapa definisi konseptual yang digunakan adalah anak, kekerasan seksual terhadap anak, kenakalan seksual anak, perlindungan anak, sistem perlindungan anak.

Anak. Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, dinyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan Seksual pada Anak. Dalam Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020, Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai “segala bentuk tindakan seksual, usaha untuk melakukan tindakan seksual, atau komentar seksual yang tidak diinginkan yang ditujukan

terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan pemaksaan, oleh siapapun terlepas dari hubungannya dengan korban, dalam latar belakang apapun". Hal ini juga mencakup bentuk-bentuk yang bersifat kontak fisik dan non-kontak, diantaranya namun tidak terbatas pada: (a) bujukan atau paksaan kepada seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang berbahaya secara psikologis maupun ilegal, (b) penggunaan anak dalam eksploitasi seksual komersial; (c) penggunaan anak dalam gambaran visual atau audio terkait kekerasan seksual; dan (d) prostitusi anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam dunia pariwisata, perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual (didalam dan antar negara), penjualan anak untuk tujuan seksual dan pernikahan paksa.

Kenakalan Seksual Anak. Kriminologi membedakan pengertian kejahatan, perilaku menyimpang dan kenakalan. Ciri utama kejahatan adalah pola tindakan yang merugikan. Ciri utama perilaku menyimpang adalah pola tindakan yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat. Kenakalan anak ciri utamanya adalah pelakunya adalah yang dikategorikan sebagai anak. Tindakan kenakalan anak dapat saja merupakan tindakan yang bila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan atau perilaku menyimpang. Tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anak disebut kenakalan karena belum ada konsekuensi tanggung jawab hukum yang penuh bagi anak. Pelanggaran tersebut lebih mencerminkan belum berhasilnya orang dewasa atau masyarakat dalam menanamkan nilai dan norma bersama masyarakat melalui proses sosialisasi (Muhammad Mustofa, 2010). Dari latar belakang ini, dalam kriminologi ini disebut sebagai kenakalan anak.

Dalam perspektif Kriminologi, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence

E. Cohen dan Marcus Felson (1979) dalam bukunya *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (delinkuensi seksual) terhadap anak dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan atau pengawasan dan adanya motivasi dari pelaku. Dalam konteks delinkuensi seksual pada anak, ketiga faktor di atas dapat dijelaskan sebagai kejahatan seksual yang menimpa anak-anak yang dilakukan oleh anak tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya korban yang cocok atau yang tepat. Ketepatan korban berarti menarik perhatian si pelaku. Ketiadaan pengawasan pada diri korban menjadi faktor kedua. Dengan kata lain pengawasan pada diri anak menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menjadi korban/target pelaku. Aspek ketiga adalah motivasi pelaku melakukan kejahatan seksual, motivasi ini dapat dijelaskan sebagai *capable and willing to commit crime*, *motivation of need or excitement*, *perhaps has nothing to lose and reward greater than consequences*. Dengan demikian, kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak lain, dimana si anak sebagai korban diperlakukan sebagai objek pemuas seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, tipuan atau tekanan. Perlu dicatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak-anak sebagai korbannya. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual pada anak dapat berupa ekshibisme atau voyeurism, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak, dimana pelaku menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh anak atau memaksa anak untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak lainnya, sementara pelaku menyaksikan

adegan tersebut atau merekamnya.

Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak dinyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak.

Sistem Perlindungan Anak. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF mengembangkan pendekatan yang berbasis sistem yang memperkuat lingkungan yang protektif (protective environment). Pendekatan ini menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak, yang memiliki ciri: (1). Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi; (2). Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini; (3). Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.

Sistem Perlindungan Anak terdiri dari lima elemen, yaitu: (1). Sistem Hukum dan Kebijakan; (2). Sistem Peradilan Anak ; (3). Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga ; (4). Sistem Perubahan Perilaku Sosial dan (5). Sistem Data dan Informasi. Elemen – elemen tersebut berdiri sendiri namun saling saling berhubungan yang menciptakan suatu kebulatan yang padu. Dalam penelitian ini salah satu elemen yang akan dikaji dalam Sistem Perlindungan Anak adalah elemen Sistem Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak.

Teori Ekologi Perkembangan Anak. Bronfenbrenner (1994) berpendapat bahwa untuk memahami perkembangan manusia, seseorang harus mempertimbangkan seluruh sistem ekologis di mana pertumbuhan terjadi. Teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, yang meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, teman dan guru. Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu terutama pada anak usia dini sampai remaja. Subsistem keluarga khususnya orangtua dalam mikrosistem dianggap agen sosialisasi paling penting dalam kehidupan seorang anak sehingga keluarga berpengaruh besar dalam membentuk karakter anak-anak.

Mesosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Sub sistemnya terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Sebagai contoh, pengalaman kerja dapat mempengaruhi hubungan seorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu dapat menerima promosi yang menuntutnya melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik

perkawinan dan perubahan pola interaksi orangtua anak. Sub sistem eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain.

Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Sub sistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak. Menurut Berk budaya yang dimaksud dalam sub sistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Teori Ekologi Kejahatan. Penggagas awal, Robert Park yang menyimpulkan bahwa suatu wilayah pemukiman adalah serupa dengan ekologi (alam) yang akan berkembang secara alamiah. Menurut pendapat Park dan Burgess, kota tidak hanya berkembang pada wilayah pinggir saja. Kota berkembang mulai dari pusat hingga menjauh dari pusat. Pola perkembangan kota dalam Teori Ekologi Kejahatan ini adalah Zona 1 yang merupakan wilayah bisnis atau industry; Zona 2 merupakan wilayah transisi yang diinvansi oleh kegiatan bisnis dan industri; Zona 3 merupakan wilayah pemukiman pekerja yang sebagian pindah dari wilayah 2; Zona 4 merupakan wilayah pemukiman keluarga kecil dan apartemen mahal dan Zona 5 merupakan wilayah kota satelit.

Menurut Clifford R. Shaw (1929), kenakalan adalah akibat dari terlepasnya anak dari ikatan sosial konvensional dan bukan karena pengaruh biologis atau psikologis. Anak yang nakal adalah manusia normal yang tindakannya kenakalannya terkait dengan lingkungannya. Tingkat kenakalan yang tinggi hanya ditemukan di

wilayah tertentu, yaitu wilayah transisi.

Teori Disorganisasi Sosial. Teori Disorganisasi Sosial menyatakan bahwa struktur sosial seperti kemiskinan, etnis dan heterogenitas ras, dan ketidakstabilan perumahan secara langsung mempengaruhi tingkat kejahatan dan kenakalan anak. Pada wilayah kumuh ini, komunitas sebagai agen pengendalian sosial berhenti berfungsi secara efektif, dan daya tahan terhadap tingkah laku kriminal menurun, dan keadaan itu menjadi tidak hanya diberi toleransi tetapi kadang-kadang juga diterima. Hal ini dapat dilihat dari respon anak yang melakukan kenakalan yang menganggap kejadian ini merupakan kenakalan anak biasa belaka.

Kenakalan anak merupakan akibat dari lemahnya atau tidak berfungsinya pengendalian sosial terhadap anak. Pengendalian sosial adalah berbagai mekanisme yang dibuat untuk memastikan agar setiap warganya tidak melakukan pelanggaran nilai dan norma bersama. Menurut S. Glueck Dan E. Glueck dalam Teori Unraveling Juvenile Delinquency (1950), kenakalan anak dapat terjadi karena adanya kekosongan anak terkait dengan disiplin dan perhatian ayah terhadap anak, pengawasan dan perhatian ibu terhadap anak, serta lemahnya tingkat kohesi dalam keluarga.

Social Learning Theory

Teori pembelajaran ini berpendirian bahwa perilaku nakal ini dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagai mana semua perilaku tidak nakal. Salah satu tokoh yang mempopulerkan teori ini adalah Albert Bandura. Ia berpendapat bahwa individu-individu yang mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling; anak belajar bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain.

Kriminologi Kesejahteraan Sosial. Kriminologi mempelajari kejahatan, dalam

hal ini kenakalan anak, sebagai gejala sosial. Oleh karena itu Kriminologi harus memberi manfaat kepada masyarakat, yaitu ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu suatu masyarakat adil dan makmur aman sentosa yang merupakan hak dari setiap orang. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari kemerdekaan bangsa tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan. Konsep kejahatan secara umum berhubungan dengan keadaan tidak terwujudnya kesejahteraan sosial pada tingkat individu, kelompok maupun bangsa. Secara individual, seseorang melakukan kejahatan (kenakalan) dapat berhubungan dengan tidak dinikmatinya kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek, dan kemudian tindakan kejahatan (kenakalan) yang dilakukan merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan atau korbannya, juga tidak menikmati kesejahteraan sosial, atau tidak terlindungi hak asasinya untuk memperoleh rasa aman di dalam masyarakat (Muhammad Mustofa, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekankan aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Penelitian kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari metode ini adalah pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dari pada angka. Penelitian ini bersifat sukarela, artinya partisipan/responden tidak dipaksa untuk bersedia menjadi partisipan/responden penelitian, untuk itu disediakan Informed Consent.

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur merupakan lokasi yang dipilih dalam

penelitian ini karena beberapa kasus kenakalan seksual anak terhadap anak terjadi di tempat ini. Selain itu, Kecamatan Jatinegara mewakili wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, dua kali (2) lebih banyak dari kepadatan penduduk Kota Jakarta Timur.

Partisipan penelitian adalah pihak-pihak ini merupakan pihak yang berada dalam ekologi anak atau sistem perlindungan anak, yaitu orangtua/pengasuh, tetangga sekitar, aparat penegak hukum dan pemberi layanan sosial dan pemerintah setempat.

Data bersumber pada data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan dari literatur seperti hasil penelitian, jurnal, buku, berita, dokumen pemerintah dan non pemerintah, kebijakan dan program serta dokumen lain, baik online maupun offline.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kronologis Kasus

Kejadian kenakalan seksual yang dilakukan oleh 7 Anak laki-laki yang berusia 6-13 tahun, yaitu Ad/6, Rd/6, Rz/7, Vr/8, Rg/9, Er/10, Sf/13 terhadap korban (G/5, perempuan), terungkap ketika korban mengeluh kepada orangtuanya karena beberapa hari tidak bisa kencing dan selalu sakit ketika menggunakan pampers dan di pinggir vagina lecet. Kejadiannya sendiri berlangsung setelah lebaran, Oktober 2016 di sebuah rumah kosong di sekitar rumah pelaku dan korban. Sebelum kejadian ini, G juga pernah mengalami kekerasan seksual dari salah satu di antara 7 anak ini, yaitu Rz dan 2 teman lainnya (Df/6 dan ZZ/6).

Kejadian ini bermula saat Sf sedang bermain dengan teman-temannya di warung milik orangtua Df, kemudian Sf mengajak

Rz bermain ewe-ewean. Sebelumnya, Sf mengakui pernah diajak Rz untuk bermain ewe-ewean, yang diketahui Sf saat melihat Rz dan teman lainnya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan G. Melihat Rz memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan G, Sf ingin ikut juga dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan G. Kejadian pertama inilah yang membuat Sf mengajak lagi Rz untuk main ewe-ewean. Sf kemudian menyuruh Df untuk memanggil korban yang saat itu sedang bermain tidak jauh dari tempat Sf dan teman-temannya berkumpul. Setelah Df memanggil korban, Sf bersama teman-temannya berlari menuju rumah kosong. Kemudian Sf dan keenam temannya melakukan kekerasan seksual terhadap G, sementara Df berjaga-jaga di luar rumah.

Proses Penanganan Kenakalan Seksual Anak di Kepolisian

Pihak kepolisian mendapat laporan dari ibu korban, 20 Oktober 2016, kalau anaknya diajak main ewe-ewe'an oleh teman-temannya di rumah kosong. Korban diwawancara oleh seorang polwan. Ia tidak memahami kejadian ini, namun ia merasakan kesakitan dan berteriak saat itu. Kemudian anak dibawa ke RS Polri Kramatjati untuk divisum. Hasil visum menunjukkan ada luka.

Dari informasi di atas diketahui bahwa korban sudah dua (2) kali mengalami kekerasan seksual. Anak Sf dan Rz sudah dua (2) kali melakukan kenakalan seksual. Diketahui, kejadian kedua ini yang mengajak anak-anak lain untuk ikut melakukan kekerasan seksual adalah Sf dan Rz. Selain ketujuh anak ini, terdapat 2 nama anak lagi yang disebut pernah melakukan kekerasan seksual terhadap korban, yaitu Df (6) dan Zz (6) yang merupakan saudara korban. Petugas Bapas menginformasikan hal serupa bahwa korban pernah diajak sepupunya dan sebenarnya sepupunya

itulah yang memberitahukan ke anak-anak ini bahwa si korban bisa diajak main ewe-ewe'an. Namun karena kedua anak ini adalah saudara korban, diduga, hal itu membuat mereka tidak diproses hukum. Orangtua pelaku mempertanyakan, karena Df yang merupakan saudara korban tidak diproses hukum. Pertanyaan dari orangtua Anak-anak ini, mengapa Df tidak diproses merupakan tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara pihak kepolisian mengacu pada informasi dari korban bahwa yang melakukannya hanya 7 orang, tidak termasuk Df. Bagi Df, tindakan diskriminatif ini dapat berimplikasi Df tidak mendapat pembinaan dari pihak yang berwenang mengenai perilakunya yang tidak benar tersebut.

Tanggal 22 Oktober, tujuh (7) anak diperiksa oleh Penyidik. Ada 5 penyidik perempuan yang tidak berseragam yang mewawancara anak-anak ini. Paska pemeriksaan korban dan pelaku, ada pembahasan kasus untuk menindaklanjuti kasus ini. Semua orangtua (korban dan pelaku) dipanggil dan berkumpul tanggal 23 Oktober 2018 untuk diambil keputusan. Hadir pula selain polisi dari Bapas, P2TP2A, KPAI dan Satpas PPA (KPP PA). Pada saat ini, orangtua tidak terima perlakuan ini dan meminta dilanjutkan dengan proses hukum karena ada satu anak yang usianya sudah 13 tahun yang sudah dapat diproses hukum.

Pada pertemuan tanggal 23 Oktober ini disepakati dalam pertemuan koordinasi ini kalau Anak-anak perlu diamankan, karena keluarga korban meminta Anak-anak ini pergi dari tempat tinggal mereka saat itu juga. Anak-anak dititipkan di PSMP Handayani selama 15 hari, sejak tanggal 24 Oktober-8 November 2016. Anak-anak masuk ke PSMP Handayani dengan Berita Acara Serah Terima Anak Masuk No: PSMP/PAS/10/2016. Saat polisi mengantarkan Anak-anak, staf PSMP Handayani yang menerima

pihak kepolisian ini menginformasikan bahwa Anak yang diterima di PSMP Handayani adalah anak yang berusia diatas 8 tahun. Anak yang berusia dibawah delapan tahun kembali ke orangtua. Dalam kasus ini, tiga (3) Anak yang berusia di bawah 8 tahun tetap ditempatkan di LPKS PSMP Handayani, sama seperti Anak lain yang usianya di atas 8 tahun.

Pada saat masa penitipan anak hampir habis, pada tanggal 3 November dilakukan Musyawarah Pengambilan Keputusan. Jeda waktu antara pertemuan koordinasi dan musyawarah pengambilan keputusan lebih dari 7 hari, sementara menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun pasal 77 ayat 2, pengambilan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya rapat koordinasi.

Musyawarah memutuskan kasus ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan Anak-anak mendapat pembinaan di PSMP Handayani selama 3 bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2016. Hasil Pengambilan Keputusan ini dibuat Berita Acara Pengambilan Keputusan (BAPK) dan Surat Keputusan (SK/02/XI/2016/Res. Jt). Kedua dokumen ini, ditambah dengan Hasil Litmas, diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pada tanggal 18 November 2018. Jarak antara Musyawarah Pengambilan Keputusan dan Pengajuan Penetapan Pengadilan adalah 15 hari, sudah lebih dari 3 hari menurut UU SPPA pasal 21 ayat 2.

Surat Penetapan Pengadilan diterima penyidik awal Desember 2016. Dalam penetapan pengadilan ini, Hakim setuju dengan hasil pengambilan keputusan, dimana Anak-anak dibina di PSMP Handayani selama 3 bulan.

Selain itu Pengadilan meminta Polisi untuk membuat Surat Penghentian Penyidikan. Namun hingga saat ini Surat Penghentian Penyidikan belum dibuat. Pengadilan juga meminta Panitera menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan ini, selain kepada Polisi, juga kepada pembimbing kemasyarakatan serta orangtua korban dan pelaku. Tidak dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan terhadap enam (6) Anak ini dapat berdampak buruk terhadap anak. Hal ini dapat membuka celah bagi keluarga korban untuk membuka lagi kasus ini.

Untuk Sf, yang usianya sudah 13 tahun tidak diproses hukum dengan alasan keluarga korban, termasuk korban sulit dihubungi. Dalam kasus ini polisi telah melakukan diskriminasi terhadap Anak-anak pada periode usia dibawah 12 tahun dan di atas 13 tahun. Padahal bila polisi sudah mengidentifikasi bahwa ada salah satu anak yang berusia di atas 13 tahun maka sejak awal dilakukan proses hukum sesuai usia anak yang berbeda dengan Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun. Hal ini tercermin dalam Berita Acara Keputusan Bersama (BAKB) dimana nama Sf tidak tercantum. Juga pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hanya 6 anak saja yang mendapatkan penetapan pengadilan, dengan Nomor 48/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jaktim. Masing-masing anak mendapat penetapan pengadilan. Dan penetapan pengadilan yang ada hingga Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jaktim. Jadi kalau dilihat dari nomor penetapan pengadilan, yaitu nomor 48, 49, 50, 51, 52, 53, ada 6 anak yang mendapatkan penetapan pengadilan. Satu anak, yaitu Sf, tidak ada penetapan pengadilannya. Dari sisi korban, hal ini dapat mengusik rasa keadilan karena perbuatan yang dilakukan oleh Sf telah merugikan korban. Dari sisi Sf, dengan tidak diproses hukum dan tidak ada penetapan pengadilan bagi Sf, maka Sf

kehilangan hak untuk mendapat bimbingan dari Bapas paska kembali ke rumah dari PSMP Handayani. Jadi dalam proses hukum ini, polisi melakukan diskriminasi dengan hanya memproses anak yang berusia di bawah 12 tahun dan yang usia 13 tahun tidak diproses hukum.

Saat proses pemulangan anak, polisi tidak dilibatkan. Polisi malah kaget sewaktu bertemu dengan salah satu Anak ini di jalan dan tidak mengetahui kalau Anak-anak sudah keluar.

Di internal kepolisian sendiri, dengan kejadian ini tidak ada koordinasi antara unit PPA dengan satuan Binmas untuk menindaklanjutinya, misalnya dengan sosialisasi dan bimbingan kepada orangtua dan masyarakat sekitar bagaimana memulihkan keadaan Anak-anak ini dan bagaimana mencegah agar ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Juga tidak ditindaklanjuti warnet yang sering dikunjungi Anak-anak dan warnet sekitar untuk pengelolaan warnet, agar tidak membahayakan anak-anak.

Penanganan Anak oleh Petugas Balai Pemasyarakatan

Keterlibatan Bapas dalam kasus kenakalan seksual anak ini dimulai saat polisi meminta Bapas hadir dalam proses penyidikan. Saat melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) petugas Bapas menggunakan metode wawancara, observasi/pengamatan (di rumah klien/home visit, rumah korban, lingkungan sosial/tempat tinggal), dan studi dokumentasi (akte kelahiran/KK). Maksud pembuatan Litmas ini adalah untuk meneliti kasus/perkara yang dituduhkan pada Anak (klien). Sementara Tujuan dilakukan Litmas ini adalah untuk memberi saran/rekomendasi bagi penyidik penanganan ABH. Hasil dari Litmas ini untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (hukuman) atau tindakan

terhadap klien yang bersangkutan, dalam hal ini bentuk diversi yang diterima anak. Proses pengambilan keputusan bentuk diversi yang akan diterima Anak-anak ini berjenjang, mulai dari proses di internal Bapas, kemudian disampaikan kepada polisi dan meminta tanggapan orangtua/pengasuh anak.

Namun menurut petugas Bapas, belum ada Penetapan Pengadilan untuk hasil musyawarah sehingga Bapas tidak dapat melakukan pembinaan paska anak-anak keluar dari PSMP Handayani.

Penanganan oleh LPKS PSMP Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur

PSMP Handayani, merupakan satu-satunya LPKS milik Kementerian Sosial di Jakarta. Jumlah LPKS di Indonesia masih terbatas. PSMP Handayani setiap tahunnya menangani 400 kasus anak, baik anak sebagai korban, saksi maupun pelaku dari seluruh Indonesia. Kapasitasnya tiap bulannya 120 anak. SDM yang ada di tempat ini, setidaknya 1 rumah diasuh oleh 1 pengasuh (bapak dan ibu). Setiap anak didampingi oleh 1 (satu) pekerja sosial sampai mereka keluar dari tempat ini. Ada 10 peksos, perawat, 8 instruktur yang mengajari keterampilan-keterampilan ini dan 3 psikolog yang mendampingi anak-anak. Kalau ada anak yang lagi sakit, anak dibawa ke Puskesmas karena PSMP Handayani ada bekerjasama dengan puskesmas terdekat.

Saat tiba di PSMP Handayani, Anak-anak ditempatkan di Rumah Antara. Rumah Antara ini barak modelnya. Anak-anak tidur jadi satu. Waktu anak-anak itu tinggal di 1 barak ini. Anak-anak yang menempati barak ini adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Saat berada di PSMP Handayani ini, kegiatan anak-anak ada yang sama seperti sebelumnya, seperti sekolah. Tapi ada juga

kegiatan yang berbeda, seperti mengikuti bimbingan sosial. Peksos di Handayani menjalin hubungan dengan orangtua Anak-anak. Peksos mengunjungi orangtua ke rumah. Sementara dengan pihak sekolah Peksos tidak menjalin hubungan karena anak tidak lama di PSMP Handayani. Demikian juga dengan masyarakat sekitar tempat tinggal anak, Peksos tidak berhubungan.

PSMP Handayani memutuskan anak ini sudah siap dikembalikan berdasarkan perjanjiannya diawal, yaitu pembinaan selama 3 bulan. Menjelang 3 bulan itu pihak PSMP Handayani mengadakan pertemuan untuk pembahasan kasus bersama semua yang terlibat.

Selain memberikan layanan untuk penanganan Anak, Kementerian Sosial juga memiliki program untuk pencegahan terjadinya kenakalan anak yang namanya peksos goes to school. Dan kalau di Handayani ada Program Peduli Sekolah.

Anak yang Melakukan Kenakalan Seksual adalah Korban

Penelusuran kasus kenakalan seksual Anak-anak ini, baik pada lingkungan mikrosistem anak, yaitu orangtua dan lingkungan sekitar anak serta lingkungan makrosistem anak, yaitu layanan sosial dan penegakan hukum dan lingkungan makrosistem, yaitu hukum dan kebijakan, peneliti menyimpulkan bahwa anak yang melakukan kenakalan seksual merupakan korban dari tidak terimplementasinya sistem perlindungan anak dengan baik.

Lingkungan Mikrosistem Anak

Dari hasil pengamatan, lingkungan tempat Anak-anak ini tinggal adalah perkampungan yang padat penduduk. Jalan menuju rumah mereka sekitar 1 meter. Bila ada motor yang lewat, maka kita harus menyingkir, mepet ke pinggir. Di jalan ini banyak orang yang duduk-duduk atau berdiri sambil mengobrol. Orang-orang ini membalas dengan hangat sapaan dari

kami ketika melewati mereka. Untuk dapat tiba di rumah Anak-anak ini perlu melewati jalan setapak yang hanya dapat dilewati satu orang, motor sudah sulit masuk.

Fasilitas sosial yang ada di sekitar rumah tinggal klien sangat minim. Terdapat satu (1) sekolah dasar negeri dan swasta. Tidak jauh dari tempat tinggal klien, terdapat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Tempat bermain klien sangat minim. Biasanya klien bermain di gang-gang sempit di depan rumahnya atau bermain di area pemakaman umum tidak jauh dari rumah mereka atau main game di play station atau warnet.

Saat kejadian berlangsung belum ada RPTRA. RPTRACipinang Besar Utara berdiri tanggal 30 Maret 2016. Pemerintah DKI Jakarta dalam upaya memberikan pelayanan kepada anak-anak membangun RPTRA, yang memiliki sejumlah fasilitas yang dibutuhkan anak-anak yang merupakan mandat Keputusan Gubernur Nomor 340 tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). RPTRA dibangun di setiap Kelurahan bekerja sama dengan CSR Dunia Usaha. RPTRA ini merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak anak untuk berkreasi, berekreasi, bermain, berolah raga dan memanfaatkan waktu luang dengan cara yang positif yang dapat menghindari anak berbuat hal-hal yang negatif. Semua fasilitas ini bisa dinikmati dan diakses anak dengan gratis.

Pemukiman tempat tinggal anak-anak ini banyak ditempati oleh karyawan swasta, buruh pabrik dan pedagang di pasar mainan dekat rumah mereka. Petugas Bapas yang melakukan kunjungan saat Litmas menyatakan keprihatinannya akan kondisi tempat tinggal anak dan ketidakpedulian masyarakat sekeliling.

Salah satu rumah anak yang diobservasi adalah rumah permanen namun seperti

tidak terawat. Ada bau pesing, banyak debu dan sawang. Got di depan rumah tergenang. Rumah dapat dikunci. Tidak terlihat ada tempat untuk belajar anak. MCK yang kecil dan kurang bersih. Rumah Anak yang lain dalam keadaan berantakan. Ruang tamu tanpa kursi ini akan menjadi ruang tidur Anak-anak di malam hari. Ada eyang buyut Er yang sepanjang hari tinggal di ruang tamu di lantai bawah. Di rumah Er, yang merupakan warisan dari neneknya Er, tinggal empat (4) keluarga, yaitu Er sekeluarga, kakaknya ibunya (2 laki-laki, belum menikah), eyang buyutnya (perempuan) dan kakaknya ibunya Er, dengan suami dan 3 orang anaknya (2 perempuan dan 1 laki-laki). Jadi dalam satu rumah tinggal 4 KK dengan 12 anggota keluarga. Konstruksi rumah Er ini 2 lantai terbuat dari tembok, bagian dalam rumah memiliki 2 ruangan, ruang tamu digabung dengan kamar dan kamar mandi digabung dengan dapur. Di lantai 2, terdapat 1 kamar tidur. Rumah Ad, hampir sama dengan rumah Er, ditempati oleh 3 KK dengan 12 orang yang menempatinnya.

Dari 7 anak yang melakukan kenakalan seksual, 5 anak diantaranya tidak diasuh oleh orangtua (bapak dan ibu) namun diasuh oleh orangtua tunggal (ibu) atau kakek nenek. Hal ini karena orangtua bercerai/ditinggalkan ayah. Kesibukan dari ibu sebagai orangtua tunggal maupun kakek dalam mencari nafkah membuat kebutuhan fisik, emosi, sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tidak didapat anak. Mereka bertemu dengan orangtua/pengasuhnya malam hari sehingga hubungan psikologis yang terus menerus (kelekatan) tidak didapat anak.

Sebagian besar latar belakang pendidikan orangtua ketujuh anak ini adalah SD-SMA. Orangtua An dan Rz SD, bahkan orangtua Ad tidak tamat SD. Hal ini berpengaruh pada pekerjaan dan penghasilan yang didapat, yaitu sebagai buruh cuci, pedagang

dan petani yang berpenghasilan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 per minggu. Sementara yang menjadi tanggungan keluarga ini berkisar 3-6 orang, yaitu orangtua dan anak-anak. Sebagian besar ibu Anak-anak ini menikah sebelum usia mereka 18 tahun, yaitu ibu Rd, Ibu An, bahkan Ibu Er menikah karena sudah hamil dahulu.

Lingkungan Mesosistem Anak

Di Cipinang Besar Utara ini, lembaga yang menyediakan layanan konsultasi dan konseling bagi orangtua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak adalah PIKK. PIKK ini merupakan salah satu kegiatan dari PKK. PIKK ini melakukan pendampingan dan penguatan keluarga. Kegiatan ini menjadi program unggulan TP PKK yang akan diselenggarakan oleh kader-kader PKK di setiap RW. Saat ini PIKK juga sudah menjadi bagian dari mekanisme dan system perlindungan anak yang dibangun oleh Pemerintah Jakarta dalam upaya menuju Kota Layak Anak. PIKK saat ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah keluarga dan perlindungan anak. Namun PIKK di Cipinang Besar Utara belum berlangsung dengan optimal. Hal ini karena aktivis PIKK ini memegang beberapa jabatan lain, seperti aktivis jumantik, KB sehingga tidak bisa fokus memberikan layanan. Demikian pula, peningkatan kapasitas aktivis PIKK ini untuk pencegahan dan penanganan kenakalan seksual anak belum diberikan.

Saat kejadian ini berlangsung, belum ada PATBM. PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM ini merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku untuk memberikan

perlindungan kepada anak. Maksud dari Gerakan PATBM adalah untuk memberdayakan kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di masyarakat secara mandiri. Gerakan PATBM ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Sasaran dari gerakan PATBM adalah Anak yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk melindungi hak-haknya termasuk melindungi dirinya sendiri, Keluarga yaitu penguatan ketrampilan pola asuh anak dan penguatan ketrampilan hidup serta sasaran bagi Masyarakat yaitu membangun dan memperkuat norma yang ada di masyarakat.

PATBM di Cipinang Besar Utara mulai aktif bulan Oktober 2016. Para aktivis PATBM sudah mendapat pelatihan mengenai kekerasan pada perempuan dan anak selama seminggu dari KPP PA dan Dinas PP dan PA. Selain mengikuti pelatihan, aktivis PATBM ini melakukan studi banding ke Jogja dan di Bandung.

Dalam kasus kenakalan seksual ini, pengurus PATBM menindaklanjutinya dengan mengunjungi korban. Salah satu pemicu anak yang melakukan kenakalan seksual adalah karena menonton pornografi di warnet. Oleh karena itu pengurus PATBM bekerjasama dengan RW dan RT melakukan monitoring terhadap warnet. Keberadaan warnet ini cukup mengkuatirkan karena warnet ini seringkali digunakan untuk nongkrong. Dan tidak hanya sekedar nongkrong tapi juga sambil 'minum'. Seringkali hal ini memancing untuk tawuran. Pengunjung warnet ini tidak hanya dari warga RW setempat, namun juga warga dari RW lain.

Menelusuri waktu pernikahan yang dilakukan orangtua Anak-anak ini, diperkirakan, saat menikah orangtua Anak-anak tidak mengikuti kursus persiapan pernikahan, karena program dari persiapan

pernikahan baru dimulai tahun 2009. Kursus Calon Penganten (Suscaten) Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin, tertanggal 11 Desember 2009. Saat ini, untuk persiapan pernikahan bagi calon pengantin, Kemenag melalui KUA merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 12 tahun 2018 mempunyai Program Bimbingan Perkawinan (Binwin). Dalam Binwin ini dilakukan selama 2 hari dengan berbagai materi, termasuk materi hak-hak anak dan pengasuhan anak. Setelah mengikuti Binwin ini pasangan calon menikah akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini merupakan persyaratan dilangsungkannya pernikahan. Namun masih banyak calon pengantin yang tidak dapat mengikuti secara penuh kursus ini karena tidak mendapat izin dari kantor.

Lingkungan Mesosistem Anak

Keberadaan hukum dan kebijakan internasional dan nasional yang mengatur pencegahan dan penanganan kenakalan anak ini sudah banyak, setidaknya untuk instrumen international terdapat dua (2) instrumen untuk pencegahan kenakalan seksual anak, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines). Selain itu terdapat tiga (3) instrumen untuk penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu KHA, Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) dan UN Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty.

Untuk kebijakan dan perundang-undangan nasional, setidaknya terdapat lima (5) kebijakan untuk pencegahan, yaitu UUD 1945, Keputusan Presiden No 36/1990, UUNo.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak No. 23/2002, UU No. 11/2009 tentang

Kesejahteraan Sosial. Selain itu setidaknya ada tujuh (7) kebijakan untuk penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu UU Perlindungan Anak No 23/2002, UU Kepolisian No. 2/2002, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/Huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11/2012, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175/2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum dan Kebijakan Nasional, yaitu UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 ada yang sudah selaras dan ada yang belum selaras dengan instrumen hukum internasional.

KESIMPULAN

Peneliti menganalisis implementasi Sistem Perlindungan Anak (SPA) dalam Kasus Kenakalan Seksual Anak di Jatinegara, Jakarta Timur dengan Teori Perkembangan Anak oleh Bronfenbrenner. Sistem Perlindungan Anak meliputi 5 elemen, yaitu (1). Sistem Hukum dan Kebijakan; (2). Sistem Peradilan Anak ; (3). Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga; (4). Sistem Perubahan Perilaku Sosial dan (5). Sistem Data dan Informasi. Elemen-elemen SPA ini beririsan bila dimasukkan dalam Teori Bronfenbrenner. Teori Ekologi Perkembangan Anak memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem. Dalam SPA, elemen

Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga, Sistem Perubahan Perilaku Sosial dan Sistem Data dan Informasi dalam Teori Bronfenbrenner masuk dalam lingkungan mikrosistem. Dalam lingkungan mesosistem, Elemen Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga, Sistem Perubahan Perilaku Sosial dan Sistem Data dan Informasi masuk disana. Elemen SPA yaitu Sistem Hukum dan Kebijakan, Sistem Peradilan Anak dan Sistem Data dan Informasi, masuk dalam lingkungan makrosistem.

Lingkungan mikrosistem. Pada elemen Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga dan dari perspektif Kriminologi Kesejahteraan Sosial, kenakalan anak ini terjadi karena hak-hak anak tidak terpenuhi baik yang dikarenakan oleh kemiskinan maupun minimnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh orangtua. Kemiskinan membuat anak tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan tempat bermain yang dapat membuat anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Orangtua tidak dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan mengasuh anak, baik sebelum menikah maupun setelah menikah. Bahkan ketika anak yang mereka asuh telah melakukan kenakalan seksual dan mendapatkan penanganan dari Polisi, Bapas dan PSMP Handayani. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan orangtua (ayah, ibu, kakek dan nenek) membuat anak tidak mengetahui batas apa yang boleh dilakukan anak dan apa yang tidak boleh dilakukan anak. Pada elemen Sistem Data dan informasi, untuk pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga, selain ayah dan ibunya (misalnya oleh kakek nenek), tidak dicatatkan sehingga tidak ada data mengenai anak-anak yang tidak diasuh oleh ayah dan ibu.

Lingkungan Mesosistem. Pada elemen Sistem Peradilan Anak, penanganan kenakalan seksual anak yang berusia di

bawah 12 tahun ini masih banyak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Saat di kepolisian, polisi tidak memproses hukum anak yang berusia di atas 12 tahun, dengan alasan kesulitan untuk mempertemukan korban dan pelaku untuk proses diversi. Prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan, seperti soal waktu untuk litmas, pengajuan ke pengadilan untuk mendapat penetapan dan proses pengembalian anak ke keluarga. Pihak kepolisian tidak membuat Surat Penghentian Perkara. Sumberdaya manusia di Bapas baru mendapatkan pelatihan 4 tahun setelah kebijakan diterbitkan. Bapas tidak melakukan pendampingan kepada anak pasca anak keluar dari PSMP Handayani karena tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang menjadi dasar pendampingan kepada anak. Anak yang berusia di bawah 8 tahun semestinya dikembalikan kepada orangtua. Anak sempat ditempatkan anak di Rumah Antara di PSMP Handayani, yang tidak layak untuk anak-anak di bawah 12 tahun ini, bercampur dengan anak di atas 14 tahun yang melakukan pembunuhan, perkosaan dan menggunakan narkoba.

Pada elemen Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga, layanan terkait pengasuhan, untuk mencegah anak melakukan kenakalan seksual, seperti dari RPTRA, PIKK dan Binmas Kepolisian belum berfungsi optimal. Layanan yang ada lebih berfungsi ketika anak sudah bermasalah, seperti PPA Kepolisian, Bapas dan PSMP Handayani.

Negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk penanggulangan kemiskinan belum dapat menjangkau keluarga miskin di perkotaan ini dengan program-program yang telah ada. Tempat tinggal yang tidak layak, dimana anak dan orangtua dalam satu kamar memicu kenakalan anak karena anak mempraktekkan apa yang dia lihat ketika orangtuanya melakukan hubungan suami istri. Lingkungan tempat tinggal yang sangat sempit, tidak ada lahan untuk bermain sehingga anak-anak bermain di warnet dan menggunakan rumah kosong untuk bermain ewe-ewe'an.

Lingkungan Makrosistem. Pada elemen Sistem Hukum dan Kebijakan, untuk mencegah anak tidak melakukan kenakalan seksual, UU Pengasuhan Anak tidak mengatur kompetensi pengasuh dalam lingkup pengasuhan keluarga. Kompetensi pengasuh diatur untuk pengasuhan alternatif. Tidak diaturnya kompetensi pengasuh ini membuat anak diasuh seadanya tanpa pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dari orangtua/pengasuh.

Sebagai penutup, peneliti menyimpulkan bahwa anak yang melakukan kenakalan seksual ini merupakan korban dari lingkungan mikrosistem, mesosystem dan makrosistemnya, dengan kata lain Sistem Perlindungan Anak tidak terimplementasi dengan baik dalam mencegah mereka melakukan kenakalan seksual dan menangani mereka ketika melakukan kenakalan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Beerling Kwee, Mooij dan Van Peursen, 1990, Pengantar Filsafat Ilmu, PT Tiara Wacana, Yogyakarta.

Doyle Paul Johnson, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, University of South Florida, Jilid 1. Diindonesiakan oleh Robert

M.Z. Lawang.

Michael Howlett/M. Ramesh, 1955. Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press.

Muhammad Mustofa, 2013, Metode Penelitian Kriminologi, Edisi Ketiga, Prenadamedia Group, Jakarta

- Muhammad Mustofa, 2010, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Edisi Kedua, Sari Ilmu Pratama, Bekasi.
- M. Kemal Darmawan, 2007. Teori Kriminologi. Penerbit Universitas Terbuka.
- ECPAT International, 2014, National Child Protection System In The East Asia And Pacific Region A Review And Analysis Of Mappings And Assessments).
- Sudarminto, J, 2002 Epistemologi Dasar. Pengantar Filsafat Pengetahuan. Pustaka Filsafat, Kanisius, Yogyakarta.
- UNICEF East Asia And Pacific Regional Office (EAPRO) 2015, Evidence - Strengthening Child Protection Systems Legal Protection From Violence. Analysis Of Domestic Laws Related To Violence Against Children In ASEAN Member States. Legal Protection From Violence.
- Van Peursen CA, 1980. Orientasi di Dalam Filsafat. Diterjemahkan oleh Dick Hartoko, PT Gramedia, Jakarta.
- Modul Sistem Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bapenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UNICEF, 2014.
- Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Selaku Ketua Badan Kebijakan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Nasional (BKP4N) Nomor : 217/Kpts/M/2002 TENTANG Kebijakan Dan Strategi Nasional Perumahan Dan Permukiman (KSNPP) Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Selaku Ketua BKP4N
- Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/Kpts/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah.
- JURNAL
- Adriasih, 2004, Perilaku Remaja di Permukiman Kumuh. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti, 2015
- D.T. Maclay, 1960. Boys Who Commit Sexual Misdemeanors. *British Medical Journal*, Jan 16, 1960
- Evelyn Buchan Crook, 1934. Cultural Marginality in Sexual Delinquency. *American Journal of Sociology* Vol 39 No. 4
- Fathia H Ph.D, 1984, Rural Migration And Juvenile Delinquency In Iraq: A Case Study Of Medenat Al-Thov/Rah In Baghdad-Jumaili, State University Of New York at Buffalo.
- Gusmaini, 2010, Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur), Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan Departemen Ilmu Tanah Dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Intaglia Harsanti dan Dwi Gita Verasari, 2013. Kenakalan pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orangtua. Fakultas Psikologi Gunadarma dalam *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil)* Vol 5 Oktober 2013
- Karen Heimer and Ross L. Matsueda (1994), *Role-Taking, Role-Commitment, and Delinquency : A Theory of Differential Social Control*.
- Khumas, Asniar dkk, Peran Fantasi Agresi terhadap Perilaku Agresif Anak-anak. *Jurnal Psikologi* 1997, No. 1, 21-29, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Modul Sistem Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Nasional, UNICEF, 2015
- Michael Leon Leaf B.S, 1991, *Land Regulation and Housing Development in*

Jakarta, Indonesia: From the “Big Village” to the “Modern City”, Dissertation of Doctor Of Philosophy In City And Regional Planning In The Graduate Division Of The University Of California At Berkeley.

Puti Larasati, 2015, Perilaku Remaja di Permukiman Kumuh. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Trisakti, Jakarta

Raymund E. Narag, 2013, Mitigating Crime In A Slum Community: Understanding The Role Of Social Structures, Social Processes, And Community Culture In A Neighborhood Intervention Program, A Dissertation of Michigan State University, Doctor Of Philosophy.

INTERNET

https://www.unicef.org/indonesia/id/A7_B_Ringkasan_Kajian_Perlindungan.pdf

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bocah-5-tahun-di-jatinegara-digilir-7-temannya-di-rumah-kosong.html>

<http://www.jpnn.com/read/2016/10/21/475724/Ya-Ampun-Bocah-5-Tahun-Diperkosa-7-Anak-di-Bawah-Umur->

<http://poskotanews.com/2016/10/20/>

<http://www.telingamata.com/di-jatinegara-anak-usia-7-tahun-sudah-jadi-pemeriksa/>

<http://m.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/21/anak-lima-tahun-diperkosa-tujuh-bocah-di-jakarta>

<http://m.suara.com/news/2016/10/21/133258/gadis-diduga-diperkosa-tujuh-bocah>

<https://www.publica-news.com/berita/daerah/2016/10/21/3841/anak-lima-tahun-diperkosa-tujuh-bocah-ingusan.html>

<https://m.merdeka.com/peristiwa/bocah-5-tahun-di-jatinegara-digilir-7-temannya-di-rumah-kosong.html>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/21/12411901/bocah.5.tahun.diperkosa.oleh.tujuh.teman.sepermainannya>

<http://m.beritasatu.com/megapolitan/394137-polisi-selidiki-bocah-perempuan-diperkosa-ramairamai-di-jatinegara.html>

<http://business-law.binus.ac.id/2017/08/29/pertanggungjawaban-pidana-anak-sebagai-pelaku-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>